

ABSTRAKSI

Implementasi kebijakan publik dalam lingkup desa mungkin sudah terdengar usang dalam topik kebijakan publik di Indonesia. Akan tetapi, topik penelitian implementasi kebijakan publik dalam pemberdayaan masyarakat dalam kasus Lumbung Mataraman di Desa Bendung memiliki beberapa hal “segar” yang fenomenanya ramai dipelajari dan menjadi acuan bagi desa lain pada saat penelitian ini yaitu kurun waktu tahun 2022-2023. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Lumbung Mataraman di Desa Bendung mampu berhasil memberdayakan masyarakat dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Tidak hanya itu saja, Lumbung Mataraman Bendung berhasil memiliki pendapatan asli desa yang masuk melalui desa maupun kelompok masyarakat yang melakukan visitasi untuk sekadar berkunjung sebagai wisatawan maupun untuk belajar mengenai pengelolaan dana desa dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima Desa Bendung. Temuan penting dalam studi ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam implementasi kebijakan Lumbung Mataraman Bendung. Selain itu, ditemukan juga dampak implementasi kebijakan berupa peningkatan peningkatan kemampuan ekonomi serta beberapa peningkatan progresif dari segi pertanian. Studi ini berkontribusi untuk membuka wawasan mengenai kemampuan desa untuk menjadi desa mandiri yang tidak hanya memanfaatkan dana desa, tetapi juga desa yang produktif dan tidak hanya mengurus urusan birokratif saja.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, partisipasi, pemberdayaan, masyarakat, desa, dana desa, dana keistimewaan, pendapatan asli desa

ABSTRACT

The implementation of public policies within the village scope might seem outdated in the realm of public policy discourse in Indonesia. However, the research topic of implementing public policies for community empowerment in the case of Lumbung Mataraman in Bendung Village presents some "fresh" aspects that have garnered significant attention and serve as a reference for other villages during the study period from 2022 to 2023. This study aims to examine how the implementation of the Lumbung Mataraman policy in Bendung Village successfully empowered the community through high community participation. Moreover, Lumbung Mataraman in Bendung managed to generate village's own income through both village initiatives and community groups visiting for educational purposes or as tourists interested in learning about the management of village funds and the Special Region of Yogyakarta's Special Allocation Fund received by Bendung Village. The key findings of this study highlight the high level of community participation in the implementation of the Lumbung Mataraman policy in Bendung. Furthermore, it also revealed the impact of policy implementation, such as improvements in economic capacity and several progressive advancements in the agricultural sector. This study contributes to broadening insights into the village's capacity to become self-reliant, not merely reliant on village funds, but also as a productive entity, not solely occupied with bureaucratic affairs.

Keywords: Policy implementation, participation, empowerment, community, village, village funds, special allocation fund, village's own income